

SKRIPSI

**PENGARUH PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN PERAN PENGAWAS TERHADAP KEBERHASILAN USAHA
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI)
KOTA PARIAMAN**



OLEH :

SULWANA KEMALA JUNAIDI

13348/2009

**PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian
Intern Dan Pengawas Terhadap Keberhasilan
Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia
(KPRI) Kota Pariaman

Nama : Sulwana Kemala Junaidi

Bp/NIM : 2009/13348

Keahlian : Akuntansi

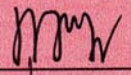
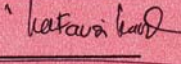
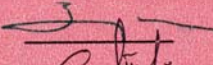
Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Fakultas : Ekonomi

Universitas : Universitas Negeri Padang

Padang, Januari 2014

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Dr. Marwan, M.Si	 _____
2.	Sekretaris	: Eka Fauzihardani, S.E, M.Si, Ak	 _____
3.	Anggota	: Dr. Syamwil, M.Pd	 _____
4.	Anggota	: Tri Kurniawati, S.Pd, M.Pd	 _____

ABSTRAK

Sulwana Kemala Junaidi (2009/13348) Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dan Peran Pengawas Terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Pariaman

**Pembimbing 1. Dr. Marwan M.Si
2. Eka Fauzihardani, S.E, M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris sejauhmana pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap keberhasilan usaha, pengaruh peran pengawas terhadap keberhasilan usaha dan pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap keberhasilan usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Pariaman.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Koperasi yang terdaftar di Dinas Koperindag Kota Pariaman yang berjumlah 27 KPRI. Penelitian ini menggunakan Teknik Total Sampling untu mendapatkan sampel sehingga semua populasi yang berjumlah 27 KPRI dijadikan sampel. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner yang diantar langsung ke KPRI Kota Pariaman dan dokumentasi berupa laporan SHU KPRI tahun 2010 - 2012. Metode analisis data yang digunakan adalah analisi berganda, dengan keberhasilan usaha sebagai variabel terikat, pelaksanaan sistem pengendalian intern dan peran pengawas variabel bebas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan sistem pengendalian intern dan peran pengawas berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Pariaman dengan besar kontribusi antara pelaksanaan sistem pengendalian intern dan peran pengawas adalah 0,859 atau 85,9%, (2) Pelaksanaan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan dan positif terhadap keberhasilan usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Pariaman tingkat signifikansi $0,000 > \alpha = 0,05$ atau $t_{hitung} = 9,261 > t_{tabel} = 1,999$, (3) peran pengawas berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Pariaman tingkat signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$ atau $t_{hitung} = 9,716 > t_{tabel} = 1,999$.

Berdasarkan penelitian ini maka disarankan untuk Koperasi hendaknya melaksanakan Sistem pengendalian intern dalam hal melaksanakan elemen-elemen sistem pengendalian intern. Meningkatkan Peran Pengawas Koperasi agar para pengurus lebih terawasi dan terkoordinasi dengan baik. Hal ini untuk meningkatkan lagi Keberhasilan usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Pariaman.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan ke-hadirat Allah SWT pencipta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Dan Peran Pengawas Terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Pariaman**”. Dan syalawat berangkaian salam tidak lupa penulis ucapkan kepada junjungan alam, yakni nabi Muhammad SAW yang telah memberikan perubahan kepada umat manusia untuk menjadi manusia yang berilmu pengetahuan dan berakhlakul kharimah.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis tidak lepas dari bantuan bimbingan dan dorongan dari banyak pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
2. Bapak Dr. Marwan, M.Si selaku Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran untuk membimbing serta mengarahkan penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala arahan, motivasi, dan solusi selama proses bimbingan banyak hal yang penulis dapatkan dari Bapak

3. Ibu Eka Fauzihardani SE, M.Si, Ak selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, selalu sabar dalam menghadapi kelalaian penulis, terima kasih atas support yang Ibu berikan, semua yang penulis lewati tidak akan menjadi lebih mudah tanpa bimbingan dari Ibu
4. Ibu Dra. Armida S. M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
5. Bapak Rino, S.Pd, M.Pd selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
6. Bapak Dr. Syamwil, M.Pd selaku Penguji I
7. Ibu Tri Kurniawati, S.Pd, M.Pd selaku Penguji II
8. Bapak/Ibu dosen staf pengajar dan staf administrasi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan masukan dan saran terhadap skripsi ini
9. Bapak/Ibu Karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis dengan penuh keramahan

10. Bapak Supan Weri Mandar sebagai Staf Tata Usaha Program Studi Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis dengan penuh keramahan
11. Yang teristimewa buat Ayahanda Terbaik Drs. Junaidi Arief dan Ibunda Terhebat Nizamiah Ilyas, Nana Ucapkan Terima kasih untuk doa dan kasih sayang yang tak terhingga sepanjang masaa, serta telah menjadi Orangtua yang selalu Romantis dan akan selalu memberikan kebahagiaan dalam keluarga kecil kita. Amiin Ya Rabb
12. Yang terkasih Kakakku Rahayu Fitrahtul Junaidi, SE., terima kasih untuk semua bantuanmu, walaupun tak selalu harmonis, You'll always my Sista. Dan Adikku Tryani Walnizam Junaidi, terima kasih untuk bantuan dikala sulit, My Best Sista, juga Adikku Ilhamdi Fujian Junaidi, semoga akan terus menjadi lelaki yang baik
13. Dwi Rahmadj Setya Budi, lelaki sederhana yang selalu setia menemani, mendengarkan keluh kesah, memberikan solusi, dikala susah dan senang, serta selalu memberikan dukungan baik dalam bentuk apapun, yang mungkin tak terhitung jumlahnya. InsyaAllah tetap menjadi pribadi yang sesuai dengan namanya. Amiin Ya Rabb
14. Sahabat Nacha-Ku, Mesya Fitika, Annisa Fitri, Rahmadona Putri, SH. Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik di dunia

15. Sahabat TBF, Rita Syofyan, S.Pd, Pupi Wahyuni, S.Pd, Fadhila Rullyan, S.Pd, Dilla Rahmatika, S.Pd, Vinessia, S.Pd, Syahri Mardian, S.Pd, Faisal Arif, S.Pd, Alm.Adlin Umara. Selamat Kalian semua sudah S.Pd

16. Teman-teman sejawat dan seperjuangan Pendidikan Ekonomi Tahun Angkatan 2009, serta yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga segala bimbingan dan dorongan serta perhatian yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amin.

Penulis menyadari dengan segala kekurangan dan keterbatasan dari penulis, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh sebab itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Padang, Januari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Pembatasan Masalah	11
D. Perumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	13
 BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Kajian Teori.....	14
1. Keberhasilan Usaha Koperasi	14
a. Pengertian Keberhasilan Usaha.....	14
b. Usaha Meningkatkan Keberhasilan Usaha Koperasi	16
c. Faktor-faktor Yang Memperngaruhi Keberhasilan Usaha Koperasi	18
d. Cara Mengukur Keberhasilan Usaha Dalam Koperasi.....	20
2. Sistem Pengendalian Intern.....	26
a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern.....	26
b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern.....	30
c. Pihak-pihak yang bertanggung Jawab Terhadap Sistem Pengendalian Intern.....	34

d. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern.....	36
3. Peran Pengawas Koperasi.....	42
B. Penelitian Yang Relevan.....	44
C. Kerangka konseptual	45
D. Hipotesis	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	49
C. Populasi, Sampel dan Responden	49
D. Jenis dan Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Definisi Operasional	53
G. Instrumen Penelitian	54
H. Uji Coba Instrumen Penelitian.....	57
I. Model dan Teknik Analisis Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sampel Dan Responden Penelitian	66
B. Analisis Deskriptif	67
C. Hasil Uji Asumsi Klasik	82
D. Hasil Analisis regresi Berganda.....	85
E. Uji Model	87
F. Uji Hipotesis	89
G. Pembahasan.....	90
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	99
B. Keterbatasan Penelitian.....	100
C. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Laporan kekayaan (Modal, Volume Usaha, Net Asset, SHU) KPRI Kota Pariaman.....	5
2. Daftar Nama KPRI yang Terdaftar di Koperindag Kota Pariaman	50
3. Skala Pengukuran.....	55
4. Kisi-kisi Kuesioner	56
5. Hasil Uji Validitas.....	58
6. Kriteria Besarnya Koefisien Reliabilitas.....	59
7. Hasil Uji Reliabilitas.....	60
8. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	66
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	67
10. Karakteristik Responden Berdasarkan Keahlian Yang Ditempuh	68
11. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	69
12. Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	70
13. Statistik Deskriptif	71
14. Distribusi Keberhasilan Usaha Indikator ROI Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Pariaman tahun 2010-2012	72
15. Analisis Deskriptif Variabel Pelaksanaan sistem pengendalian intern dan peran pengawas	74
16. Distribusi frekuensi indikator Pengendalian administrasi	75
17. Distribusi frekuensi indikator Pengendalian akuntansi.....	76
18. Distribusi frekuensi indikator Elemen-elemen Sistem Pengendalian intern	77
19. Perbandingan TCR masing-masing Indikator Variabel Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (X_1).....	78
20. Distribusi frekuensi indikator Tugas Pengawas.....	79
21. Distribusi frekuensi indikator Wewenang Pengawas.....	80

22. Perbandingan TCR masing-masing Indikator Variabel Peran Pengawas (X2)	81
23. Hasil Uji Normalitas	83
24. Hasil Uji Multikolinearitas.....	84
25. Analisis Regresi Linear Berganda.....	85
26. Hasil Uji F Statistik.....	87
27. <i>Adjusted R Square</i>	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	47
2. Scatterplot Uji Heterokedastisitas.....	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Angket uji coba penelitian	105
2. Hasil uji coba penelitian	109
3. Angket penelitian.....	112
4. Tabulasi data.....	116
5. Data Perolehan ROI KPRI Kota Pariaman.....	118
6. Tabel Tingkat Capaian Responden(TCR).....	119
7. Hasil olahan data penelitian.....	121
8. Tabel T	123
9. Tabel F	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 sudah tidak selaras dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian di Indonesia dan telah diubah menjadi UU Nomor 17 tahun 2012. Jika sebelumnya status koperasi adalah perkumpulan yang bertujuan menyejahterakan anggota serta sebagai badan usaha, saat ini sesuai dengan UU yang baru maka status koperasi adalah sebagai badan hukum.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2012 tanggal 29 Oktober 2012 Tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat 1 Koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahaan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Disamping itu pada pasal 4, Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Setelah adanya perubahan Undang-undang tentang perkoperasian, Jenis koperasi dibagi menjadi 4 (empat) koperasi berdasarkan bidang usahanya yaitu; produsen, konsumen, Koperasi Simpan Pinjam dan jasa lainnya.

Koperasi sebagai organisasi di bidang ekonomi dan sosial ini sangat rawan terhadap risiko kerugian. Kerawanan tersebut dapat bersumber dari unsur intern maupun ekstern. Unsur-unsur intern seperti adanya sifat manusia yang curang, ambisi, malas, ceroboh, mau menang sendiri, sekongkol, atau bisa juga seperti harta kekayaan koperasi yang relatif besar nilainya sehingga perlu diamankan. Sedangkan unsur-unsur ekstern seperti adanya pihak-pihak atau oknum yang kurang menyukai kegiatan usaha koperasi karena persaingan atau faktor-faktor lain yang ingin mendahulukan kepentingannya dengan cara memanfaatkan kelemahan manajemen koperasi (Tambunan, 2008). Ditambah lagi, menurut Dep.Kop dan UKM (2002:155) pengalaman menunjukkan, bahwa pengamanan atas kekayaan koperasi masih rentan, dan penggunaan kekayaan juga banyak yang tidak tepat, sehingga menjadikan koperasi kurang mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak.

KPRI merupakan koperasi primer yang anggotanya para pegawai negeri di Indonesia. Dengan dibentuknya koperasi ini diharapkan pegawai mampu berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan masing-masing dan memetik hasil dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Agar usaha KPRI benar-benar dapat menjamin tujuan berkoperasi, maka KPRI diharapkan dapat meningkatkan usahanya tanpa adanya kecurangan dari pihak manapun. Dengan tidak adanya kecurangan berarti jika KPRI memperoleh laba/SHU, maka anggota akan menerima bagiannya sesuai dengan prinsip yang berlaku. Hal itu akan

mendorong KPRI untuk meningkatkan keberhasilan usahanya dalam hal ini peningkatan perolehan laba/SHU.

KPRI Kota Pariaman dinilai belum mampu mengembangkan usahanya dan masih terfokus pada usaha simpan pinjam saja. Padahal Banyak usaha lain yang dapat dilaksanakan, seperti penyediaan barang-barang kebutuhan pokok dan harian anggota. Sekarang ini jumlah koperasi yang ada di Kota Pariaman adalah 81 unit. Dari jumlah tersebut, 52 unit masih aktif, sedangkan sisanya 29 unit sudah tidak aktif. Koperasi yang tidak aktif adalah koperasi yang secara badan hukumnya belum bubar dan masih memiliki kepengurusan, namun pelaksanaan usaha serta kepengurusannya belum sepenuhnya terlaksana. Koperasi yang tidak memberikan laporan pertanggungjawaban pengurus kepada Diskoperindag selaku pembina koperasi, juga dianggap tidak aktif. Selain itu ketidakaktifan koperasi tersebut berasal dari pengurus dan anggota koperasi itu sendiri seperti pengurus tidak dapat menampilkan laporan pertanggungjawaban dan atau anggota koperasi macet dalam pembayaran pinjaman (EksposNews, 2012).

Ditambah lagi, Walikota Pariaman dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekdako Armen (Padangmedia.com : 2010) mengatakan bahwa secara kuantitas, perkembangan koperasi di Kota Pariaman relatif mengembirakan namun secara kualitas ke depan perlu dilakukan evaluasi pengembangannya dalam rangka mensejahterakan anggotanya dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Soewardi (1995: 109) koperasi di Indonesia pertumbuhannya bersifat “*static expansion*” artinya pertumbuhan kuantitatif tidak

disertai dengan kemajuan secara kualitatif. Hal ini disebabkan karena koperasi tidak dikelola dengan manajemen yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Nurwahid (2004) beberapa hal yang harus mendapat perhatian khusus adalah :

1. Koperasi sudah saatnya untuk memposisikan dirinya sebagai entitas bisnis, maka sudah sewajarnya koperasi menyandarkan aktivitasnya pada tiga prinsip dasar yang utama yaitu kemandirian, rasionalitas, dan peningkatan efisiensi
2. Sebagai sebuah lembaga koperasi belum mampu berperan secara baik di masyarakat yang dapat menjadi faktor pematik agar masyarakat secara sadar memilih lembaga ini sebagai pilihan berusaha dan berinvestasi
3. Kuatnya pola paternalistik yang dikembangkan pada lembaga koperasi pada umumnya. Implikasi negatif yang muncul pada hubungan paternalistik ini adalah lemahnya pengawasan baik internal maupun eksternal yang akhirnya menimbulkan kerawanan penyimpangan dan manipulasi
4. Adanya implementasi undang-undang otonomi daerah, di satu sisi akan memberikan dampak positif bagi koperasi dalam hal alokasi sumber daya alam dan pelayanan pembinaan lainnya, namun demikian di sisi lain koperasi akan semakin menghadapi masalah yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dalam bentuk penempatan lokasi investasi dan skala kegiatan koperasi
5. Esensi perdagangan bebas dengan menghilangkan sebanyak mungkin hambatan perdagangan melalui peniadaan *non tariff barier*, yang memungkinkan terjadinya keleluasaan dalam perdagangan barang.

Menurut Thoby (1992:89) pertumbuhan (keberhasilan) usaha dilihat sebagai usaha peningkatan dalam kuantitas asset usaha, jasa, pendapatan, SHU, simpan pinjam, kekayaan, modal sendiri. Menurut Dep.Kop. dan PK & M (1997:23) pertumbuhan atau keberhasilan usaha merupakan suatu kondisi atau keadaan bertambah majunya suatu maksud dalam suatu kegiatan yang dilihat dari volume usaha, net asset dan laba bersih. Peningkatan atau penurunan yang terjadi

pada Koperasi dari Perolehan modal, volume usaha, net asset, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi dapat dilihat dari Laporan perolehan kekayaan koperasi dapat ditunjukkan dari Rapat Anggota Tahunan (RAT). Berikut ini merupakan data perolehan jumlah kekayaan KPRI kota Pariaman dari tahun 2010 – 2012.

Tabel 1.
Data Laporan Jumlah kekayaan (Modal, Volume Usaha, Net Asset, SHU) Seluruh KPRI di Kota Pariaman

No.	Tahun RAT	Modal (Rp Juta)		Volume Usaha (RpJuta)	Net Asset (Rp Juta)	SHU (RpJuta)
		Modal Sendiri	Modal Luar			
1.	2010	Rp19.725	Rp28.677	Rp14.086	Rp49.590	Rp1.039
2.	2011	Rp24.529	Rp26.067	Rp20.290	Rp50.596	Rp1.433
3.	2012	Rp25.677	Rp26.172	Rp25.999	Rp51.822	Rp1.599

Sumber : Dinas Koperindag, 2013

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa KPRI kota Pariaman yang tercatat dalam data Dinas Koperindag sebanyak 27 KPRI mengalami peningkatan dalam memperoleh kekayaannya (Modal, Volume Usaha, Net Asset, SHU) selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2010, 2011, dan tahun 2012. Koperasi dapat dikatakan berhasil dalam usahanya agar pihak manajemen dapat memenuhi kewajibannya terhadap para anggotanya dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Cara untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu usaha dalam suatu perusahaan dapat diketahui dengan cara menganalisis hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan. Analisa laporan keuangan merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang

dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang.

Untuk mengetahui keberhasilan usaha Koperasi dapat dilihat menggunakan Rasio Profitabilitas, Rasio ini biasa disebut juga rasio rentabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio profitabilitas diukur dengan menggunakan ROI, yaitu rasio yang menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktiva. Dalam hal ini laba bersih koperasi ditunjukkan dalam SHU Koperasi dan diukur dengan total aktiva Koperasi.

Menurut Pertemuan Ilmiah Seminar Pembinaan KUD Mandiri Propinsi Jawa Tengah, Semarang (1991) dalam Trisnawati (2009 : 3) kelemahan-kelemahan koperasi dalam hal keberhasilan usaha yang menyangkut Modal, Asset, Volume Usaha dan SHU, serta Sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut :

- a. Koperasi masih belum mampu mengadakan pemupukan modal sendiri sehingga kegiatan usaha koperasi masih tergantung oleh fasilitas simpan pinjam
- b. Koperasi masih belum memiliki prasarana dan sarana usaha yang lengkap dalam menunjang usahanya. Di lain pihak, koperasi sudah memiliki/ menguasai prasarana dan sarana usaha namun belum dimanfaatkan dan dikelola sendiri secara optimal.
- c. Volume usaha koperasi belum sepenuhnya dapat ditingkatkan
- d. Serta kelemahan karena keterbatasan kemampuan para pelaksana usaha mengakibatkan perencanaan organisasi pelaksanaan dan

pengawasan pengendalian dalam kegiatan usaha belum berjalan sebagaimana yang diharapkan

Untuk dapat mengatasi hal itu, pengurus memerlukan alat manajemen sebagai media pengendali, yaitu pengendalian intern. Pengendalian intern merupakan suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran kategori sebagai berikut : efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Rama, 2008 : 132).

Di samping itu juga berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan, laporan juga mempunyai arti untuk melihat apakah kebijakan yang telah ditentukan dijalankan, apakah kondisi keuangan sehat, kegiatan penjualan menguntungkan, dan hubungan antarbagian atau unit usaha berlangsung harmonis. Sistem pengendalian intern akan berada dan mempengaruhi kegiatan keberhasilan usaha. Berikut beberapa alasan mengapa SPI diperlukan (Trisnawani, 2009 : 10) adalah :

1. Luas dan ukuran k esatuan usaha yang menjadi begitu kompleks dan meluas sehingga manajemen harus mempercayai berbagai macam laporan-laporan dan analisis-analisis untuk mengendalikan operasi secara efektif
2. Pengawasan dan penelaahan pada sistem pengendalian intern yang baik mampu melindungi kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan kesalahan atau ketidakberesan yang akan terjadi
3. Adalah tidak praktis apabila auditor atau pemeriksa untuk memeriksa secara keseluruhan dengan keterbatasan uang jasa (fee) tanpa mempercayai sistem pengendalian intern.

Adapun pada butir 4.1 Laporan Committee of Sponsoring Organizations (COSO) mengidentifikasi lima komponen sistem pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Komponen pengendalian internal merupakan proses untuk menghasilkan pengendalian yang memadai.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan 2 orang Staff Dinas Koperindag yang dilakukan pada tanggal 16 April 2013 diketahui bahwa pengamanan atas kekayaan koperasi yang masih rentan dapat dilihat dari laporan pertanggungjawaban setiap KPRI dimana KPRI kota Pariaman yang melakukan usaha simpan pinjam masih terdapat kesalahan pencatatan kas sehingga pegawai yang mencatat transaksi tersebut bertanggung jawab mengganti kas yang salah ataupun hilang sehingga dinilai kurang dalam Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan.

Sistem pengendalian intern dilaksanakan oleh pengurus sebagai pengelola koperasi. Dalam mengelola koperasi, pengurus selaku kuasa rapat Anggota melakukan kegiatan semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi bagi anggotanya sesuai dengan keputusan rapat anggota, maka pengurus harus menyusun laporan keuangan koperasi sebagai pertanggung jawaban tugasnya kepada anggota pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahunnya. Kemampuan pengurus untuk mencapai tujuan koperasi dalam mencapai keberhasilan usaha terletak pada fungsi perencanaan dan pengawasan yang telah ditetapkan. Fungsi perencanaan merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan,

sedangkan fungsi pengawasan merupakan langkah akhir dalam proses pencapaian tujuan manajemen. Lemahnya sistem pengawasan sering menimbulkan kerugian, kesalahan, pemborosan dan penyelewengan. Untuk menghindari penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan koperasi, maka diperlukan suatu sistem pengawasan dalam koperasi yang dilakukan oleh badan pengawas sehingga dapat membantu pengurus untuk mengawasi semua fungsi dan kegiatan terutama dalam mengamankan harta kekayaan koperasi.

Badan pengawas merupakan elemen dari sistem pengendalian intern. Agar pengurus mendapatkan informasi yang objektif dan independen diperlukan bagian pengawas dalam struktur organisasi koperasi yang berfugsi sebagai auditor intern dan tidak terlibat dalam aktivitas operasional koperasi sesuai dengan Undang-undang no.17 tahun 2012 pasal 49 ayat 5 menyatakan Pengawas dilarang merangkap sebagai Pengurus. Menurut Ibnu Soedjono (2001) dalam Subaktri (2010), Badan pengawas harus memiliki kemampuan akuntansi, misalnya membaca neraca, memahami organisasi dan manajemen serta memahami jati diri koperasi. Artinya badan pengawas harus mempunyai pengetahuan seperti akuntan. Di banyak koperasi, badan pengawas kerap menjadi pajangan untuk menyebut koperasi itu lengkap secara organisasi dan tidak berdaya (Suhud dalam Subaktri, 2010).

Menurut Suhud (2001) dalam Subaktri (2010) lemahnya pengawas disebabkan oleh dua faktor sebagai berikut :

1. Pengawas menjadi orang kedua artinya jabatan badan pengawas ditempati oleh orang-orang yang tidak terpilih menjadi pengurus, sehingga kualitas personil pengawas berada di bawah pengurus
2. Pengawas tidak memiliki kemampuan untuk membaca laporan koperasi artinya pengawas tidak mempunyai kritis untuk mengetahui dan memantau masalah yang terjadi di koperasi.

Pengurus dan pengawas KPRI sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh para manajer dan karyawan berjalan sebagaimana mestinya. Mengingat luasnya kegiatan usaha KPRI memungkinkan pengurus dan pengawas KPRI tidak dapat mengawasi atau mengendalikan secara langsung seluruh kegiatan usaha sehingga hal itu mengakibatkan pengamanan atas kekayaan KPRI rentan dan penggunaannya banyak yang kurang tepat. Oleh karena itu, pengurus dan pengawas KPRI perlu melakukan pengawasan atau pengendalian atas kegiatan bawahannya, agar kesalahan dan penyimpangan yang terjadi tidak berlangsung lama, segera dapat diatasi. Dengan demikian KPRI akan mendapat kepercayaan dari berbagai pihak untuk mengembangkan usahanya. Kepercayaan pihak luar dapat menjadikan KPRI memperoleh berbagai dukungan dari anggota, yang meliputi dukungan modal, dukungan usaha, sehingga usaha-usaha koperasi menjadi lebih berkembang.

Dari uraian kondisi KPRI yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dan Peran Pengawas Terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Pariaman”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Terdapat koperasi yang tidak aktif karena pengurus tidak dapat menampilkan laporan pertanggungjawaban dan anggota koperasi macet dalam pembayaran pinjaman
2. Terdapatnya kelemahan-kelemahan yang dimiliki koperasi dalam hal peningkatan keberhasilan usaha
3. Sistem pengendalian intern KPRI kota Pariaman kurang berjalan secara optimal dalam hal pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi
4. Masih lemahnya peran Pengawas koperasi

C. Pembatasan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka banyak permasalahan yang dapat diteliti, mengingat banyaknya ruang lingkup yang akan diteliti Maka penulis hanya membatasi permasalahan pada pengaruh pelaksanaan Sistem pengendalian intern dan Peran Pengawas terhadap keberhasilan usaha (SHU) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Pariaman.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh pelaksanaan Sistem pengendalian intern dan peran pengawas terhadap keberhasilan usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Pariaman?
2. Sejauhmana pengaruh pelaksanaan Sistem pengendalian intern terhadap keberhasilan usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Pariaman?
3. Sejauhmana pengaruh peran pengawas terhadap keberhasilan usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Pariaman?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris :

1. pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian intern dan peran pengawas terhadap keberhasilan usaha KPRI Kota Pariaman
2. pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap keberhasilan usaha KPRI Kota Pariaman
3. pengaruh peran pengawas terhadap keberhasilan usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Pariaman.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

- a. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan Ekonomi UNP dan sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman serta menambah daftar pustaka baru yang dapat dimanfaatkan oleh penulis dan mahasiswa lain
- b. Bagi Akademik pada umumnya dan Jurusan Ekonomi pada khususnya, sebagai sumbangan pengetahuan praktis mengenai sistem pengendalian intern koperasi dalam prakteknya

2. Kegunaan praktis

Bagi KPRI sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian intern dalam rangka meningkatkan perkembangan usahanya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KAJIAN TEORI

1. Keberhasilan Usaha Koperasi

a. Pengertian Keberhasilan Usaha

Koperasi berasal dari kata *co* yang berarti bersama dan *operation* yang mengandung makna bekerja. Jadi, secara harfiah koperasi bermakna sebagai suatu perkumpulan kerja sama yang beranggotakan orang-orang maupun badan-badan dimana ia memberikan kebebasan untuk keluar dan masuk sebagai anggotanya (Anoraga 2002:1).

Menurut Undang-undang no.17 Tahun 2012 pasal 1, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Sedangkan menurut Pedoman Umum Akuntansi Koperasi yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yaitu laporan keuangan internasional (*International Financial Reporting Standard* atau IFRS), Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu koperasi mempunyai fungsi dan peran untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha anggota pada umumnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya.

Keberhasilan berasal dari kata dasar hasil yang artinya sesuatu yang diadakan, dibuat atau dijadikan oleh usaha, dan berhasil artinya mendatangkan hasil tercapainya maksud (Poerwadarminta 2002:348). Sedangkan usaha artinya kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud (Poerwadarminta 2002:1136). Dari uraian tersebut keberhasilan usaha dapat diartikan suatu kondisi atau keadaan tercapainya suatu maksud atau tujuan yang telah dikerjakan oleh suatu badan, tenaga, dan pikiran.

Menurut Thoby (1992:89) pertumbuhan (keberhasilan) usaha dilihat sebagai usaha peningkatan dalam kuantitas asset usaha, jasa, pendapatan, SHU, simpan pinjam, kekayaan, modal sendiri. Secara umum, variabel kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan (*growth*) koperasi di Indonesia sebagai badan usaha terdiri dari kelembagaan (jumlah koperasi per propinsi, jumlah koperasi per jenis/kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan non aktif), keanggotaan, volume usaha, permodalan, asset, dan Sisa hasil Usaha (Sitio 2001:137). Sedangkan menurut Departemen Koperasi dan PK & M

(1997:23) pertumbuhan atau keberhasilan usaha merupakan suatu kondisi atau keadaan bertambah majunya suatu maksud dalam suatu kegiatan yang dilihat dari volume usaha, nett asset dan laba bersih.

Dari pengertian di atas keberhasilan usaha dapat diartikan suatu kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran agar terjadi perubahan yang lebih baik atau bertambah maju, baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Jadi, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan keberhasilan usaha KPRI adalah tercapainya tujuan secara kelembagaan dan kegiatan usaha yang telah direncanakan oleh KPRI Kota Pariaman.

b. Usaha Meningkatkan Keberhasilan Usaha Koperasi

Agar supaya koperasi dapat terkelola dengan baik, dapat bertahan dan berkembang dalam melaksanakan usaha-usahanya maka perlu diperhatikan usaha mempertinggi tingkat efisiensi koperasi itu sendiri. Koperasi harus mampu menangani bidang-bidang usahanya dengan biaya atau pengeluaran yang sehemat-hematnya, yaitu dengan cara harus sanggup menghindarkan pemborosan-pemborosan. Beberapa pedoman untuk meningkatkan keberhasilan usaha koperasi (Widiyati, 2010), diantaranya yaitu :

1) Penghematan pengeluaran

Modal dan investasi-investasi yang diperoleh koperasi untuk mengembangkan usaha-usahanya harus benar-benar dipelihara dan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Penggunaan modal harus digunakan untuk usaha-usaha yang tepat dengan pengeluaran-pengeluaran (inputs) yang sehemat-hematnya, sehingga keberhasilan usaha akan tercapai.

2) Perencanaan usaha

Perencanaan usaha harus benar-benar dipertimbangkan dan diperhitungkan. Penyusunan rencana usaha yang mantap sebaiknya diserahkan kepada anggota pengurus yang memiliki skill dan pengalaman luas dengan dasar keputusannya demi keberhasilan dan perkembangan usaha koperasi.

3) Produktivitas/peningkatan hasil per kapita

Dalam hal ini usaha yang dijalankan koperasi harus dapat mendorong para anggotanya agar bergairah kerja, sehingga peningkatan hasil akan diperoleh dan hal ini berarti diperolehnya peningkatan pendapatan oleh para anggota

4) Usaha koperasi dengan gambaran jelas bagi kemudahan pemasaran dan kemantapan harga

Kegairahan berproduksi sangat berkaitan dengan usaha koperasinya yang menjamin pemasaran yang mudah dan perolehan

harga yang wajar dan memuaskan para anggotanya. Untuk mempertahankan kegairahan berproduksi para anggotanya, koperasi harus mempertahankan pula gairah para konsumen untuk membeli produk-produk jadi dengan memenuhi kuota yang ditentukan.

c. **Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Koperasi**

Koperasi untuk dapat mengembangkan usahanya perlu mengingat akan efektivitas dan efisiensi usaha. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi usaha menurut Widiyati (2010) adalah :

1) Efisiensi proses usaha

Sebagai bentuk usaha koperasi juga harus melaksanakan fungsi-fungsi yang dimaksud seperti fungsi pembelanjaan, produksi, pemasaran, personalia dan administrasi

2) Loyalitas anggota

Loyalitas anggota tercermin pada kesetiaan anggota sebagai pelanggan koperasi, memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak keanggotaannya dalam segala bentuk kegiatan didalam tata kehidupan koperasi. Ketertiban anggota untuk melunasi simpanan wajib saja belum dapat dijadikan ukuran untuk menilai loyalitas anggota apalagi di dalam koperasi fungsional yang simpanan wajibnya langsung dipotong koperasi dari gajinya.

3) Penawaran yang cukup

Barang-barang yang dibutuhkan oleh anggota ataupun kepentingan lainnya yang sesuai dengan bidang usaha koperasi hendaknya cukup tersedia di koperasi, sehingga mereka tidak perlu mencarinya diluar koperasi. Tersedianya semua barang-barang kebutuhan anggota di koperasi akan mendidik anggota menjadi pelanggan yang setia

4) Persaingan

Keberadaan bentuk usaha lain di luar koperasi, memaksa koperasi untuk bersaing. Oleh karena itu, koperasi harus peka terhadap pengaruh persaingan itu didalam upaya mengendalikan usahanya. Koperasi tidak bisa menentukan sendiri harga barang-barang dan jenis barang yang dijual oleh koperasi, karena secara psikologis setiap individu, selalu berusaha untuk menentukan pilihannya terhadap barang-barang yang dibutuhkan mereka.

5) Harga eceran

Perbedaan harga eceran koperasi dengan harga eceran di pasar merupakan salah satu sumber koperasi untuk meningkatkan tabungan anggota di koperasi. Apabila koperasi dapat membeli dengan harga eceran yang lebih murah di pasar dan menjualnya dengan harga eceran koperasi yang lebih tinggi, maka selisih harga kedua eceran ini, akan menjadi tabungan anggota di dalam koperasi.

Sedangkan menurut Apsari (1987:5) berhasil tidaknya pengelolaan koperasi tergantung dari berbagai faktor, namun demikian untuk mencapai keberhasilan setiap koperasi harus berpedoman pada “tiga sehat”. Adapun pedoman tiga sehat itu meliputi :

- 1) Sehat organisasi yaitu kerja sama yang teratur, disertai pembagian tugas yang jelas
- 2) Sehat usaha yaitu koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang dalam menjalankan usahanya harus berdasarkan prinsip ekonomi, sehingga tercapai tingkat efisiensi sesuai dengan rencana
- 3) Sehat mental merupakan dasar utama dari kokohnya koperasi. Tanpa adanya dukungan sehat mental, suatu koperasi meskipun memenuhi dua sehat sebelumnya, belum dapat dikatakan sempurna dan memenuhi harapan.

d. Cara Mengukur Keberhasilan Usaha Dalam Koperasi

Sampai saat ini belum ada suatu ukuran keberhasilan yang mantap mengenai lembaga ekonomi koperasi sebagai badan usaha ekonomi masyarakat. Ukuran keberhasilan sebenarnya sangat penting diperlukan untuk dapat mengarahkan kegiatan koperasi secara komprehensif dan terpadu agar dapat mengembangkan suatu badan usaha ekonomi yang mendukung keterlanjutan pembangunan yang lebih tepat, efektif dan efisien.

Berkaitan dengan kepentingan-kepentingan tertentu terhadap hasil-hasil dari berbagai kegiatan koperasi, Hanel (1994) membedakan tiga jenis efisiensi dalam koperasi yaitu :

1) Efisiensi pengelolaan usaha

Sejauhmana suatu koperasi dikelola secara efisien dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya sebagai suatu lembaga ekonomi atau usaha. Jadi efisiensi operasional adalah sejauhmana tujuan yang telah disepakati organisasi koperasi khususnya perusahaan koperasi telah tercapai, yaitu efisiensi ekonomis berupa kestabilan keuangan dan prestasi usaha suatu perusahaan.

2) Efisiensi yang berkaitan dengan pembangunan

Efisiensi pembangunan dari organisasi swadaya koperasi berkaitan dengan penilaian atas dampak-dampak yang secara langsung atau tidak langsung ditimbulkan oleh koperasi sebagai kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan pemerintah

3) Efisiensi yang berorientasi pada kepentingan para anggota

Efisiensi anggota adalah suatu tingkat dimana melalui berbagai kegiatan pelayanan yang bersifat menunjang kepentingan koperasi dan tujuan para anggota tercapai.

Sebagai entitas bisnis kinerja dan keberhasilan usah koperasi dapat dianalisis dengan analisis keuangan dan non keuangan. Salah satu ukuran kinerja keuangan dapat dianalisis dengan ROI (*Return On Investment*).

Dalam hal ini ROI (*Return On Investment*) merupakan bagian dari rasio profitabilitas, dimana rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas ini sangat diperhatikan oleh calon maupun pemegang saham karena akan berkaitan dengan harga saham serta dividen yang akan diterima.

Menurut Riyanto (2001:336) *Return on Investment* atau tingkat pengembalian investasi menunjukkan tingkat kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan netto. Sedangkan menurut Fakhruddin dan Hadiananto (2001:65) *Return on investment* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Harahap (2004:305) mengemukakan *Return on invesment* adalah suatu rasio yang menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari modal pemilik.

Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktiva. Semakin besar rasio ini maka semakin baik. Analisa *Return on Investment* dalam analisa keuangan mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisa keuangan yang bersifat menyeluruh (komprehensif). Analisa *Return on Investment* merupakan teknik analisa yang lazim digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengukur efektifitas dari keseluruhan operasi

perusahaan. Dengan demikian, maka faktor-faktor yang mempengaruhi *Return on Investment* adalah:

1) *Net Profit Margin*

Net profit margin ini mengukur tingkat keuntungan bersih yang dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan dengan penjualan.

2) *Total Assets Turnover*

Perputaran aktiva menunjukkan bagaimana efektivitas perusahaan menggunakan keseluruhan aktiva untuk menciptakan penjualan dan mendapatkan laba.

Menurut Munawir dalam “Analisa Laporan Keuangan” (2001:91), *Return on Investment* memiliki kegunaan sebagai berikut :

- 1) Sebagai salah satu kegunaan yang prinsipil ialah sifatnya yang menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek akuntansi yang baik maka manajemen dengan menggunakan teknik analisa *Return on Investment* dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi dan efisiensi bagian penjualan
- 2) Apabila perusahaan dapat mempunyai data industri sehingga dapat diperoleh ratio industri, maka dengan analisa *Return on Investment* ini dapat dibandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya dengan perusahaan lain yang sejenis, sehingga dapat diketahui apakah perusahaannya berada di bawah, sama, atau di atas rata-ratanya. Dengan demikian, perusahaan tersebut dapat mengetahui kekuatan dan

kelemahan perusahaannya dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis

- 3) Analisa *Return on Investment* pun dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi/bagian, yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan
- 4) Analisa *Return on Investment* pun dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan menggunakan “*product cost system*” yang baik, modal dan biaya dapat dialokasikan kepada berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan sehingga dengan demikian akan dapat dihitung profitabilitas dari masing-masing produk. Dengan demikian, maka manajemen akan dapat mengetahui produk mana yang mempunyai “*profit potential*”
- 5) Analisis *Return on Investment* selain dapat berguna untuk keperluan pengendalian, juga berguna untuk keperluan perencanaan. Analisis *Return on Investment* dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bila akan mengadakan ekspansi usaha.

Untuk mengukur *Return On Investment* (ROI) digunakan Rumus berikut :

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Bersih (SHU)}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Dalam Pedoman Umum Akuntansi Koperasi menyatakan bahwa “Sisa Hasil Usaha adalah penjualan barang/jasa sebagai pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu periode akuntansi dikurangi dengan biaya operasional, penyusutan dan biaya-biaya lain, termasuk pajak dalam satu periode akuntansi bersangkutan. Selisih Hasil Usaha adalah Surplus Hasil Usaha atau Defisit Hasil Usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan Koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha (Undang-undang no.17 Tahun 2012 Pasal 1).

Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dengan cadangan dibagikan kepada anggota dan sebagian digunakan untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan perkoperasian. Selain untuk memenuhi kebutuhan cadangan, anggota maupun dana pendidikan, koperasi dapat membagi Sisa Hasil Usaha untuk keperluan lain, menurut keputusan rapat anggota atau ketentuan anggaran dasar, atau ketentuan yang berlaku pada koperasi bersangkutan, misalnya untuk kebutuhan dana sosial, dana pengurus, dan sebagainya. Dalam hal jumlah pembagian SHU telah diatur dengan jelas, maka bagian Sisa Hasil Usaha yang bukan menjadi hak koperasi, diakui sebagai kewajiban. Bagian SHU yang merupakan hak koperasi diakui sebagai cadangan dan merupakan ekuitas koperasi. Apabila jumlah pembagiannya belum diatur secara

jelas, maka Sisa Hasil Usaha tersebut dicatat sebagai SHU tahun berjalan serta harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Perhitungan Hasil Usaha adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha koperasi dalam satu periode akuntansi. Penyajian akhir dari perhitungan hasil usaha disebut SHU (Sisa Hasil Usaha). SHU bukan semata-mata mengukur besaran laba tetapi juga menggambarkan manfaat lain bagi anggota.

2. Sistem Pengendalian Intern

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern merupakan istilah umum dan banyak digunakan dalam berbagai kepentingan. Fungsi pengendalian intern semakin penting karena perusahaan semakin berkembang. Sistem pengendalian Intern menurut Widjajanto (2001 : 18) adalah :

“Suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk :

- a. mengamankan aktiva perusahaan
- b. mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi
- c. meningkatkan efisiensi, dan
- d. mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi”.

Sedangkan menurut Dep.Kop dan UKM (2002:162) pengendalian intern dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris (pengawas pada koperasi), manajemen (pengurus dan

manajer/direksi), personel organisasi (koperasi, perusahaan) yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan organisasi : (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Trisnawati (2009 : 10) dalam arti luas Sistem pengendalian intern meliputi struktur/ susunan organisasi serta semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi. Pengertian Sistem pengendalian dalam arti luas dibagi menjadi pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi. Pengendalian administrasi meliputi rencana organisasi dan semua prosedur serta catatan-catatan yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan yang mengarah pada orientasi manajemen atas suatu transaksi. Pengendalian akuntansi meliputi organisasi, semua prosedur, dan catatan yang berhubungan dengan pengamanan harta kekayaan, serta dapat dipercayainya catatan keuangan.

Menurut Hartadi (1986) dalam Trisnawati (2009 : 12) ada dua unsur yang mempengaruhi sistem pengendalian administrasi, yaitu rencana organisasi dan kebijaksanaan.

1) Rencana organisasi

Sistem rencana organisasi merupakan tulang punggung (sarana) sistem pengendalian intern karena proses pengambilan keputusan yang menuju ke sistem pemberian wewenang (otorisasi) untuk

melaksanakan transaksi akan banyak dipengaruhi oleh rencana organisasi. Demikian pula sistem pemisahan tugas yang merupakan unsur sistem pengendalian intern sedikit banyak bergantung pada rencana organisasi.

Dalam menyusun rencana efektif untuk memperkuat sistem pengendalian intern, perlu diadakan pemisahan tugas antara berbagai fungsi operasi, penyimpanan dan pencatatan pemisahan fungsi tidak berarti, bahwa koordinasi ditiadakan. Tanggung jawab tiap bagian juga merupakan masalah penting. Oleh karena pelimpahan wewenang memerlukan tanggung jawab, maka tanggung jawab rangkap sebaiknya dihindari.

2) Kebijakan

Sistem-sistem yang bersifat usaha memperoleh efisiensi dan mencapai tujuan ketaatan terhadap kebijaksanaan pimpinan yang tidak langsung berhubungan dengan catatan keuangan. Hal ini dapat diwujudkan, misalnya dalam laporan kegiatan merupakan alat pengawasan yang efektif untuk mengecek sampai seberapa jauh pelaksanaan usaha sesuai dengan rencana.

Sedangkan untuk pengendalian akuntansi, terdapat tiga elemen yaitu :

1) Pengamanan harta

Pengaman harta/ aset dalam arti luas meliputi manajemen yang digunakan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan atas kejadian-kejadian yang menyangkut sumber-sumber perusahaan. Dalam arti sempit, pengamanan harta merupakan manajemen yang digunakan untuk melindungi kerugian koperasi yang ditimbulkan dari pelaksanaan dan pencatatan transaksi serta penyimpanan dan penjagaan harta.

Kerugian tersebut dapat disebabkan kesalahan yang ringan seperti pencatatan dengan angka yang lebih rendah secara tidak sengaja di catatan bukti karena menggunakan harga per unit barang yang keliru dan pembayaran gaji yang lebih kepada karyawan karena menggunakan tarif gaji yang keliru.

2) Dapat dipercayainya catatan keuangan

Manajemen membuat keputusan berdasarkan laporan yang dibuat triwulan, tengah tahun, dan tahunan. Fungsi internal audit akan sangat membantu terhadap laporan tersebut di atas agar dapat dipercaya. Untuk tujuan internal, terdapat fakta bahwa pemeriksaan internal (audit) menghasilkan laporan akuntan yang menilai kewajaran laporan keuangan.

Jadi untuk tujuan pemeriksaan, dipercayakan catatan keuangan adalah menggunakan atau berdasarkan laporan untuk pihak luar.

Laporan untuk pihak luar biasanya mencakup data keuangan secara keseluruhan dalam laporan tahunan dan laporan lainnya.

3) Transaksi

Transaksi merupakan bagian dasar dari kegiatan koperasi, meliputi perubahan barang dan jasa antara perusahaan dan pihak luar seperti juga penggunaan dan pemakaian barang dan jasa dalam perusahaan. Oleh karena transaksi tersebut melalui sistem, pemberian otorisasi atau persetujuan pelaksanaan dan pencatatan transaksi serta pertanggungjawabannya dituangkan dalam prosedur akuntansi.

Maka dapat disimpulkan bahwa secara umum, pengendalian intern merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Sedangkan sistem pengendalian intern merupakan kumpulan dari pengendalian intern yang terintegrasi, berhubungan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan satuan usaha terdiri dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk keyakinan yang memadai bahwa tujuan usaha akan dicapai. Menurut Arens, dkk (2008 : 370),

manajemen memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif yaitu :

1) Reliabilitas pelaporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor, dan pemakai lainnya. Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.

2) Efisiensi dan efektivitas operasi

Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan yang penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan nonkeuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.

3) Ketaatan pada hukum dan peraturan

Section 404 mengharuskan semua perusahaan publik mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selain mematuhi ketentuan hukum dalam Section 404, organisasi-organisasi publik, nonpublik, dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan. Beberapa hanya

berhubungan secara tidak langsung dengan akuntansi, seperti UU perlindungan lingkungan dan hak sipil, sementara yang lainnya berkaitan erat akuntansi, seperti peraturan pajak penghasilan dan kecurangan

Secara garis besar, tujuan pengendalian intern menurut Wilkinson (1992 : 198) adalah :

1) Melindungi aktiva perusahaan

Aktiva atau harta milik perusahaan dapat saja hilang karena dicuri, disalahgunakan, rusak karena kecelakaan atau musibah dan lain-lain, sebab pada dasarnya berakibat merugikan perusahaan kecuali bila terdapat pengendalian intern yang memadai. Hal ini juga berlaku bagi kekayaan perusahaan yang tidak berbentuk fisik seperti dokumen-dokumen, piutang usaha, dan catatan-catatan lainnya

2) Untuk menjamin keakuratan data dan informasi akuntansi

Informasi dibutuhkan untuk mengetahui dan mengelola perusahaan. Terdapat banyak sekali tipe dan jenis informasi yang dibutuhkan untuk dipakai sebagai dasar dalam pembuatan keputusan penting seperti penetapan harga jual produk yang memerlukan informasi tentang harga pokok produknya

3) Untuk meningkatkan efisiensi dalam seluruh operasi perusahaan

Pengendalian bagi suatu perusahaan dimaksudkan untuk mencegah atau menghindari terjadinya peristiwa dan keadaan yang

berakibat menimbulkan pemborosan atau inefisiensi, seperti adanya duplikasi kegiatan dalam perusahaan dan pemakaian sumber-sumber ekonomi yang tidak efisien

4) Mendorong kepatuhan dalam seluruh operasi perusahaan

Manajemen menetapkan kebijaksanaan perusahaan dan prosedur pelaksanaan kegiatan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian intern beserta mekanismenya diciptakan untuk menjamin bahwa semua kebijaksanaan, peraturan, dan prosedur yang telah ditetapkan tersebut dipatuhi oleh karyawan perusahaan.

Sedangkan menurut Suharli (2006), dalam pengendalian internal terdapat berbagai tujuan. Tujuan pengendalian internal tersebut adalah :

1) Otorisasi (wewenang)

Setiap transaksi harus mendapat otorisasi semestinya berdasarkan struktur dan kebijakan perusahaan. Dalam keadaan atau masalah-masalah tertentu sangat mungkin diperlukan otorisasi khusus.

2) Pencatatan

Pencatatan atas transaksi harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan pada waktu yang tepat dengan uraian yang wajar. Transaksi yang dicatat adalah transaksi yang benar-benar terjadi dan lengkap.

3) Perlindungan

Harta fisik berwujud tidak boleh berada di bawah pengawasan atau penjagaan dari mereka yang bertanggung jawab. Dalam hal ini pengendalian internal memperkecil resiko terjadinya kecurangan oleh karyawan atau manajemen sekalipun.

4) Rekonsiliasi

Rekonsiliasi secara berkelanjutan dan periodik antar pencatatan dengan harta fisik harus dilakukan misalnya mencocokkan jumlah persediaan barang antara kartu persediaan dengan persediaan fisik di gudang.

Pengendalian intern merupakan prioritas dari manajemen, dan bukan hanya merupakan bagian dari sistem akuntansi saja. Sistem pengendalian intern dari satu perusahaan akan sama efektifnya dengan kualitas sumber daya manusia dalam organisasi. Pengendalian intern akan menjadi efektif bila semua pegawai dalam setiap tingkat organisasi menerapkan sasaran dan tujuan organisasi.

c. Pihak-pihak yang bertanggung Jawab Terhadap Sistem Pengendalian Intern

Pelaksanaan pengendalian intern melibatkan seluruh anggota, bukan dibebankan pada bagian tertentu saja, sehingga memberikan keyakinan terpecah atas keseluruhan kegiatan organisasi yang meliputi

reability dari laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas atas kegiatan atau operasi perusahaan dan kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku.

Seluruh *stakeholders* koperasi sangat berkepentingan dengan pencapaian tujuan koperasi. Oleh karena itu pada dasarnya semua *stakeholders* bertanggung jawab atas implementasi pengendalian intern yang memadai di koperasi. Namun yang paling bertanggung jawab pihak internal koperasi, yaitu :

- 1) Pengawas. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus. Pengawas mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kehidupan koperasi termasuk di dalamnya : organisasi, usaha dan kebijaksanaan pengurus.
- 2) Pengurus, Manajer/Direksi. perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Pengurus sebagai unsur manajemen bertanggung jawab sebagai badan yang memimpin koperasi. Pengurus berkewajiban untuk melaksanakan garis-garis besar usaha yang telah ditentukan oleh Rapat Anggota dan tercantum dalam Anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga Koperasi.

- 3) Auditor Intern. Auditor intern bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi memadai atau tidaknya struktur pengendalian intern entitas dan membuat rekomendasi peningkatannya
- 4) Personel Koperasi. Peran dan tanggung jawab semua personal koperasi lain yang menyediakan informasi atau menggunakan informasi yang dihasilkan struktur pengendalian interna harus ditetapkan dan dikomunikasikan dengan baik.

Sedangkan pihak ekstern yang merupakan bagian dari *stockholder* yang terkait langsung dengan fungsi pengendalian intern adalah anggota (rapat anggota) dan auditor independen. Anggota bertanggung jawab dalam mematuhi ketentuan, sistem dan prosedur bilamana menemukan praktik-praktik tidak sehat dalam pengelolaan aktivitas koperasi. Auditor independen bertanggung jawab dalam menentukan memadai tidaknya pengendalian intern untuk mengurangi lingkup pengujian (Dep.Kop dan UKM 2002:165-166).

d. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (1997:166) unsur pokok sistem pengendalian intern adalah :

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas

Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Harus dipisahkan fungsi-fungsi koperasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi
- b) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi
- c) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Dan prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan dan biaya suatu organisasi.

- 2) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah :

- a) Penggunaan formulir bernomor urut yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang
- b) Pemeriksaan mendadak (*surprised audit*)

- c) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi
 - d) Perputaran jabatan (*job rotation*)
 - e) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak
 - f) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya
 - g) Pembentukan unit organisasi (staf pemeriksa intern) yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur pengendalian intern yang lain.
- 3) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut :

- a) Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya
- b) Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

Sedangkan menurut Dep.Kop dan UKM (2002:170) pengendalian intern hanya dapat diimplementasikan dengan baik, apabila koperasi mampu membangun elemen-elemen pengendalian yang memadai. Terdapat lima elemen pokok pengendalian intern, yaitu : (1) lingkungan pengendalian, (2) penaksiran risiko, (3) informasi dan komunikasi, (4) aktivitas pengendalian, dan (5) pemantauan.

1) Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan atmosfer yang menciptakan suasana yang koheren mengenai pengendalian dalam satu organisasi (koperasi). Lingkungan pengendalian (Control Environment) terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas itu. Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas yaitu:

- a) Integritas dan nilai-nilai etis
- b) Komitmen pada kompetensi
- c) Partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit
- d) Filosofi dan gaya operasi manajemen
- e) Struktur organisasi
- f) Kebijakan dan praktik sumber Daya manusia
- g) Kesadaran pengendalian

2) Penilaian Resiko

Penilaian resiko (Risk Assessment) atas pelaporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP. Penilaian resiko merupakan identifikasi dan analisa terhadap resiko yang relevan untuk

mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.

Risiko pengendalian dapat timbul akibat perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi koperasi, dan akibat perubahan lingkungan bisnis dimana koperasi beroperasi. Perubahan didalam koperasi antara lain adalah penambahan bidang usaha baru, atau jenis transaksi baru yang memerlukan sistem dan prosedur baru. Sedangkan perubahan lingkungan bisnis antara lain perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau ketentuan pemerintah mengenai industri dan perdagangan, yang mengharuskan setiap produsen memiliki standar industri, perubahan sistem pengolahan data dari manual ke sistem berbasis komputer.

3) Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang untuk memberikan keyakinan bahwa tindakan atau aktivitas yang diperlukan telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Aktivitas pengendalian (Control activities) adalah kebijakan dan prosedur, selain yang sudah termasuk dalam empat komponen lainnya, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan entitas. Aktivitas pengendalian umumnya dibagi menjadi lima jenis berikut ini:

a) Pemisahan tugas yang memadai

- b) Otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas
- c) Dokumen dan catatan yang memadai
- d) Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan
- e) Pemeriksaan independen atas kinerja

4) Informasi dan komunikasi

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi entitas. Komunikasi meliputi luasnya pemahaman personil tentang bagaimana aktivitas mereka dalam sistem informasi pelaporan keuangan berkaitan dengan pekerjaan orang lain. Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi dari entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas itu serta mempertahankan akuntabilitas aktiva terkait.

5) Pemantauan

Pemantauan merupakan proses penetapan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Proses ini dilaksanakan melalui aktivitas pemantauan terus menerus, evaluasi secara terpisah atau kombinasi diantara keduanya. Aktivitas pemantauan berhubungan dengan

penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan, dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi.

Pengurus mempunyai tanggung jawab memantau sepanjang waktu atau secara terus-menerus tentang apakah sistem pengendalian intern yang ada masih efektif atau tidak. Bilamana koperasi diaudit oleh auditor independen, auditor tersebut akan melakukan penelaahan mengenai pengendalian intern yang ada, dan jika terdapat kelemahan ia bertanggung jawab menyampaikan kepada pengurus. Informasi dari auditor tersebut dijadikan bahan pertimbangan oleh pengurus dalam mengembangkan atau merevisi pengendalian intern yang ada (Dep.Kop dan UKM 2002:170-190).

3. Peran Pengawas Koperasi

Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus. Pengawas mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kehidupan koperasi termasuk di dalamnya : organisasi, usaha dan kebijaksanaan pengurus. Pengawasan yang dilakukan badan pengawas meliputi kebijakan yang ditetapkan dalam rapat anggota, operasional usaha dan keuangan koperasi.

Menurut undang-undang No.17 tahun 2012 pasal 50 Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) mengusulkan calon Pengurus
- b) memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus
- c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus
- d) dan melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

Selain itu, pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a) menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
- b) meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait
- c) mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus
- d) memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
- e) dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.

B. Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian relevan ini penulis belum banyak memasukkan hasil yang masih terkait dengan penelitian yang menghubungkan antara Pelaksanaan sistem Pengendalian Intern terhadap keberhasilan usaha koperasi, dikarenakan masih adanya keterbatasan dari sumber dan referensi. Namun diantaranya dapat digunakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Harimulyono (2007) mengenai pengaruh efektivitas struktur pengendalian intern terhadap keberhasilan usaha koperasi dengan jumlah sampel 32 koperasi di Kabupaten Mojokerto. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara efektivitas pelaksanaan struktur pengendalian intern (lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan) baik secara simultan maupun secara parsial terhadap keberhasilan koperasi (KPRI) di kabupaten Mojokerto.

Parno (2005) melakukan penelitian yang bertujuan Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas sistem pengendalian intern terhadap keberhasilan usaha KPRI di Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan pada KPRI yang terdaftar di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Semarang. Kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian Besar bobot sumbangan efektivitas sistem pengendalian intern terhadap keberhasilan usaha KPRI di kota Semarang sebesar 33,20 %, sedangkan sisanya sebesar 66,80 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini.

Surbakti Karo-karo (2010) melakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi badan pengawas terhadap laporan pengawasannya dilihat dari sudut pandang pengurus dan anggota koperasi. Penelitian ini dilakukan pada KPRI yang terdaftar di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) kota Medan tahun buku 2003 dan 2004 sebanyak 115 koperasi. Kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian kompetensi badan pengawas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laporan pengawasannya.

C. Kerangka Berpikir

KPRI adalah koperasi primer yang anggotanya para pegawai negeri di Indonesia. Dengan dibentuknya koperasi ini diharapkan pegawai mampu berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya serta masyarakat luas pada umumnya. KPRI merupakan badan usaha yang harus dikelola dengan baik sebagai layaknya badan usaha lain.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya dikelola secara lebih profesional. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan. Laporan pertanggungjawaban harus dapat mencerminkan bagaimana pengurus koperasi mendesain pengelolaan usaha agar semua kekayaan koperasi aman dari semua tindakan yang dapat merugikan dan penggunaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

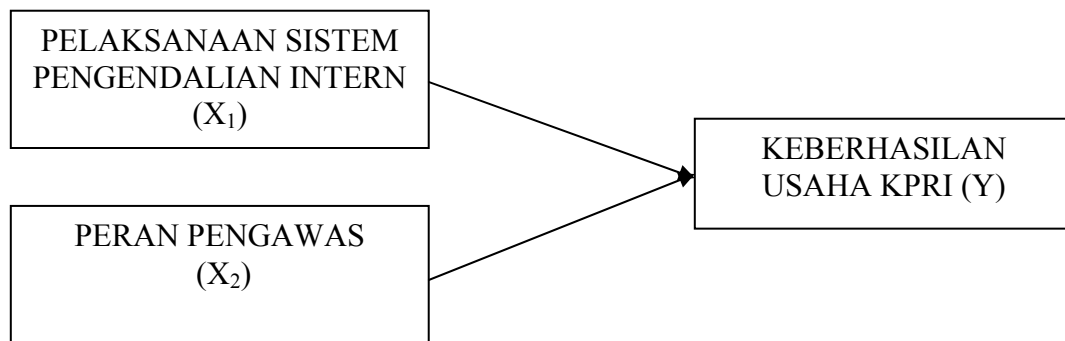
Sistem Pengendalian Intern merupakan kumpulan dari pengendalian intern yang terintegrasi, berhubungan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Pelaksanaan Sistem Pengendalian intern yang baik juga menentukan keberhasilan usaha koperasi. Sistem Pengendalian Intern terkait dengan keberhasilan usaha koperasi merupakan suatu proses yang di desain sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Dengan implementasi pengendalian intern yang memadai diharapkan keamanan atas kekayaan koperasi dan pengelolaan usaha koperasi dapat berkembang dengan baik tanpa adanya kecurangan dari pihak manapun. Dengan tidak adanya kecurangan berarti jika koperasi memperoleh laba/SHU, maka anggota akan menerima bagiannya sesuai dengan prinsip yang berlaku (Dep.Kop dan UKM 2002:155).

Di samping itu, Peran Pengawas adalah sebagai perangkat organisasi koperasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Peran pengawas terkait dengan keberhasilan usaha koperasi merupakan suatu kualitas kerjasama yang bersinerji dalam memajukan organisasi dan usaha koperasi. Agar pengurus mendapatkan informasi yang objektif dan independen diperlukan bagian pengawas dalam struktur organisasi koperasi yang berfugsi sebagai auditor intern.

Jadi, dengan melaksanakan sistem pengendalian intern yang memadai dan memperkuat peran pengawas koperasi diharapkan koperasi dapat memperoleh laba/SHU yang sesuai dengan kemampuannya. Sehingga dapat mendorong

koperasi untuk mencapai keberhasilan usahanya, dalam hal ini peningkatan perolehan laba.

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwa sistem pengendalian intern yang memadai dan kuatnya peran pengawas akan berpengaruh terhadap keberhasilan usaha koperasi



Gambar 1.
Hubungan antara Pelaksanaan sistem pengendalian intern dan peran pengawas dengan keberhasilan usaha KPRI

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan pembatasan masalah penelitian maka dapat dirumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sistem pengendalian intern dan peran pengawas berpengaruh signifikan dan positif terhadap keberhasilan usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Pariaman

2. Pelaksanaan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan dan positif terhadap keberhasilan usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Pariaman
3. Peran pengawas berpengaruh signifikan dan positif terhadap keberhasilan usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Pariaman

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara bersama-sama pelaksanaan sistem pengendalian intern dan peran pengawas berpengaruh signifikan dan positif terhadap keberhasilan usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Pariaman periode 2010 – 2012. Artinya semakin baik dan memadai pelaksanaan sistem pengendalian intern dan peran pengawas, maka semakin baik keberhasilan usaha KPRI. Dengan adanya pelaksanaan sistem pengendalian intern dan peran pengawas seharusnya KPRI lebih dapat meningkatkan SHU dalam mencapai keberhasilan usaha KPRI.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap keberhasilan usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Pariaman periode 2010 – 2012. Artinya semakin baik pelaksanaan sistem pengendalian intern koperasi, maka semakin baik pula keberhasilan usaha yang diperoleh koperasi. Dengan adanya pelaksanaan sistem pengendalian intern yang baik seharusnya koperasi lebih dapat meningkatkan SHU yang tinggi dalam mencapai keberhasilan usaha Koperasi.

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara peran pengawas terhadap keberhasilan usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Pariaman periode 2010 – 2012. Artinya semakin baik peran pengawas koperasi, maka semakin baik pula keberhasilan usaha yang diperoleh koperasi. Dengan adanya peran pengawas yang baik seharusnya koperasi lebih dapat meningkatkan SHU yang tinggi dalam mencapai keberhasilan usaha Koperasi.

B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan sehingga terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya.
2. Karena keterbatasan yang dimiliki penulis, penelitian ini hanya difokuskan pada pengurus KPRI Kota Pariaman, sebanyak 27 pengurus secara acak. Baik pengurus yang menjabat sebagai ketua, sekretaris atau Bendahara.

C. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Pariaman hendaknya melaksanakan Sistem pengendalian intern yaitu dalam hal melaksanakan elemen-elemen sistem pengendalian intern. Sehingga keberhasilan usaha Koperasi dapat ditingkatkan, karena lebih efektif untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tujuan usaha yang akan dicapai.
2. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Pariaman agar lebih meningkatkan lagi Peran Pengawas Koperasi. Agar para pengurus lebih terawasi dan terkoordinasi dengan baik sehingga keberhasilan usaha koperasi lebih baik lagi ke depannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat menguji kembali variabel-variabel bebas lain yang signifikan dan dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat dan terhadap keberhasilan usaha koperasi pegawai Republik Indonesia (KPRI) atau mencari indikator lain mengenai faktor-faktor penentu keberhasilan usaha koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji dan Djoko Sudantoko. 2002. *Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. Semarang: Rineka Cipta
- Apsari, E. Sri. 1987. *Proses Penyusunan Laporan Keuangan untuk Koperasi*. Yogyakarta: Penerbit Liberty
- Arens, A. Alvin, dkk. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance Jilid 1*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta
- Departemen Koperasi dan PPK. 1997. *Formulir dan Petunjuk Pembinaan Koperasi Per triwulan dan tahunan*. GKPRI
- Departemen Koperasi Republik Indonesia Lembaga Management Universitas Indonesia. 1990. Materi sistem pengendalian intern (SPI) pada pelatihan peningkatan keterampilan pelatih akuntansi. Jakarta : Departemen koperasi republik indonesia, lembaga management UI
- EksposNews. 2012. Banyak Koperasi di Pariaman yang Tidak Aktif. Diakses Tanggal 16 November 2012
- Handoko, T. Hani. 1995. *Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit BPFE
- Harimulyono, Nurrohman. 2007. Pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Keberhasilan Koperasi (KPRI) Di Kabupaten Mojokerto. Media Ekonomi Melalui (<http://jurnal.ump.ac.id>) Vol 7 No.2
- Hartadi, Bambang. 1986. *Sistem Pengendalian Intern Dalam Hubungannya Dengan Manajemen dan Audit*. Yogyakarta : BPFE
- Hendrojogi. 2012. *Koperasi : Asas-asas, Teori, dan Praktik* Edisi Revisi 2004. Jakarta : Rajawali Press
- Hendry, Simamora. 2000. *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis Jilid I*. Jakarta : Salemba Empat